

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM  
PEMBANGUNAN NASIONAL**



# **KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL**

**Editor:**

**Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D., APU**

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jakarta, 2017

**Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)**

Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional / Achmad Sani Alhusain, SE., MA., Ariesty Tri Mauleny, S.Si., ME, Nidya Waras Sayekti, SE, MM., Lisnawati, S.Si., MSE.; editor: Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D ., APU.—Ed. 1; Cet. 1.—Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

xiv + 140 hlm; 15,5 x 23 cm  
ISBN 978-602-433-579-3

Judul:  
Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam  
Pembangunan Nasional  
Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D ., APU. (ed.)

*Copyrights* © 2017  
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
All rights reserved

Penerbitan ini atas kerja sama  
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan  
Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2017  
YOI: 1469.36.23.2018  
Desain sampul: Rahmatika

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jln. Plaju No. 10, Jakarta 10230  
Telepon: +62 (0)21-31926978, 31920114  
Faksimile: +62 (0)21-31924488  
Email: [yayasan\\_obor@cbn.net.id](mailto:yayasan_obor@cbn.net.id)  
Website: [www.obor.or.id](http://www.obor.or.id)

# KATA PENGANTAR

*Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam Sejahtera,

Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terbitnya buku yang berjudul *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional* yang disusun oleh peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Hasil analisis berupa gagasan dan pemikiran serta pengalaman empiris yang dituangkan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menguatkan hubungan keuangan pusat dan daerah. Pendekatan analisis dilakukan tidak hanya berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan namun juga berdasarkan *review* berbagai kajian terkait serta analisis empiris berdasarkan studi-studi sebelumnya.

Struktur buku terdiri atas 6 (enam) bagian tulisan yang memiliki keterkaitan yang baik untuk memperkaya pembahasan mengenai kebijakan dan strategi peningkatan PAD di Indonesia serta pembangunan nasional dari berbagai perspektif. Bagian pertama dan bagian terakhir tulisan merupakan prolog dan epilog yang menjadi

*Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*

bagian yang tidak terpisahkan dari buku ini dan disusun oleh Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D.,APU selaku editor buku ini.

Saya sampaikan apresiasi kepada masing-masing penulis yang terdiri dari Achmad Sani Alhusain, Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, dan Lisnawati yang telah menghadirkan beragam warna mengenai Kebijakan dan Strategi Peningkatan PAD. Buku ini mengawali pembahasannya dengan memaparkan secara jelas mengenai kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai bagaimana kebijakan dan strategi peningkatan PAD yang dilengkapi dengan gambaran terperinci mengenai hubungan antara instrumen PAD dengan indikator pembangunan. Pada bagian akhir akan ditutup dengan analisis empiris dan temuan di lapangan mengenai kebijakan dan strategi peningkatan PAD yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dan Bandung.

Saya sampaikan apresiasi kepada rekan-rekan peneliti dan terima kasih kepada Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya. Kepada penerbit disampaikan penghargaan atas kerja samanya dalam penerbitan buku ini bersama dengan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Besar harapan saya, buku ini akan bermanfaat, bukan saja dalam perumusan rancangan undang-undang khususnya namun juga dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Jakarta, September 2017  
Kepala Pusat Penelitian  
Badan Keahlian Dewan  
Dr. Indra Pahlevi

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
<b>BAGIAN KESATU</b>	
<b>PROLOG : PENINGKATAN PAD DAN PEMBANGUNAN NASIONAL</b>	1
<i>Carunia Mulya Firdausy</i>	
<b>BAGIAN KEDUA</b>	
<b>KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	
<i>Achmad Sani Alhusain</i>	7
I    PENDAHULUAN	7
II   KONSEPSI DESENTRALISASI, DESENTRALISASI FISKAL DAN INSTRUMEN PENDAPATAN ASLI DAERAH	13
A. Desentralisasi	13
B. Desentralisasi Fiskal	17
C. Instrumen Pendapatan Asli Daerah	19
III  KONDISI DAN KENDALA PENDAPATAN ASLI DAERAH	23
A. Kondisi Pendapatan Asli Daerah	23
B. Kendala untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	25

IV	STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	30
V	PENUTUP	34
	DAFTAR PUSTAKA	35

### **BAGIAN KETIGA**

#### **STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN TUJUAN PEMBANGUNAN**

	<i>Ariesy Tri Mauleny</i>	39
I	PENDAHULUAN	39
II	PEMBANGUNAN REGIONAL, PERKEMBANGAN KEWENANGAN SERTA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	43
	A. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Regional	43
	B. Perkembangan Kewenangan Otonomi Daerah	44
	C. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	47
III	KEBIJAKAN DAN PERKEMBANGAN PENERIMAAN DAERAH	49
	A. Perkembangan Kebijakan Pendapatan Asli Daerah	49
	B. Perkembangan Penerimaan Daerah	52
	C. PAD Provinsi dan Capaian Pembangunan Regional	57
IV	PAD DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT	59
	A. Gambaran Umum	59
	B. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah	61
	C. PAD Kabupaten/Kota dan Capaian Pembangunan Regional	64
V	PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN PAD	67
	A. Permasalahan Pengelolaan PAD	68
	B. Strategi Pengelolaan PAD	71
VI	PENUTUP	73
	DAFTAR PUSTAKA	75



## **BAGIAN KEEMPAT**

### **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN STRATEGI**

### **PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

### **PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

<i>Nidya Waras Sayekti</i>	77
I PENDAHULUAN	77
II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG	79
A. Profil Kota Tangerang	79
B. Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kota Tangerang	81
III STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG	83
A. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang	83
B. Strategi Peningkatan PAD Pemerintah Kota Tangerang	87
IV HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM PENINGKATAN PAD	93
V PENUTUP	93
DAFTAR PUSTAKA	95

## **BAGIAN KELIMA**

### **KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERINTAH KOTA**

### **BANDUNG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI**

### **DAERAH**

<i>Lisnawati</i>	97
I PENDAHULUAN	97
II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG	102
III KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDUNG	106

IV	PERMASALAHAN DAN UPAYA PENINGKATAN PAD	108
V	PENUTUP	118
	DAFTAR PUSTAKA	120
<b>BAGIAN KEENAM</b>		
<b>EPILOG: KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN</b>		
<b>PAD KE DEPAN</b>		
	<i>Carunia Mulya Firdausy</i>	121
	DAFTAR PUSTAKA	130
	INDEKS	131
	BIOGRAFI EDITOR DAN PENULIS	135

## DAFTAR TABEL

### Bagian Ketiga

#### **STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN TUJUAN PEMBANGUNAN**

Tabel 1. <i>Pairwise Correlation</i> untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Seluruh Provinsi di Indonesia, 2009-2015	58
Tabel 2. <i>Pairwise Correlation</i> Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2009-2015	65

### Bagian Keempat

#### **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

Tabel 1. Perkembangan PAD Kota Tangerang Tahun 2011-2015	84
Tabel 2. Target dan Realisasi Komponen PAD Kota Tangerang Tahun 2015	84

### Bagian Kelima

#### **KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Tabel 1. Perkembangan PAD Kota Bandung Tahun 2015-2016	107
---	-----



# DAFTAR GAMBAR

## Bagian Kedua

### STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Gambar 1. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan TA 2016	11
Gambar 2. Proporsi Komponen Pendapatan Daerah, Agregat APBD Provinsi se-Indonesia TA 2016	24
Gambar 3. Perbandingan Pajak, Retribusi, Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2016	26

## Bagian Ketiga

### STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN TUJUAN PEMBANGUNAN

Gambar 1. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	39
Gambar 2. Perkembangan Penerimaan Daerah Seluruh Indonesia, 2006-2015	49
Gambar 3. Perkembangan PAD per Provinsi di Indonesia, 2010-2014	53
Gambar 4. Perkembangan Pajak Daerah di Indonesia, 2009-2015	54
Gambar 5. Perkembangan Retribusi Daerah di Insonesia, 2009-2015	55

Gambar 6. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat dan Rata-Rata PDRB , 2009-2015	62
Gambar 7. Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Rata- Rata PDRB, 2009-2015	63

## **BAGIAN KESATU**

### **PROLOG: PENINGKATAN PAD DAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

*Carunia Mulya Firdausy<sup>1</sup>*

Pembangunan di Indonesia sesungguhnya merupakan proses memanusiakan manusia. Namun dalam perjalanannya dihadapkan oleh sejumlah tantangan yang multidimensi dan kompleks. Bagi Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi dengan kondisi geografis dan potensi sumber daya yang berbeda-beda, tidaklah mudah untuk melaksanakan pembangunan. Namun upaya untuk mengatasi persoalan pembangunan harus terus dilakukan. Pemerintah bersama DPR harus terus berupaya menyusun kebijakan nasional untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah diberlakukanlah otonomi daerah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah

---

1 Penulis adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR).

menghadirkan kemandirian daerah. Untuk mencapai kemandirian daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu instrumen fiskal yang tidak dapat dihindari dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Namun setelah 17 tahun berlangsung, capaian kemandirian daerah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya melalui PAD masing-masing ditemukan belum menggembirakan. Sampai tahun 2016 tercatat belum ada daerah yang persentase PAD terhadap pendapatan daerahnya mencapai 70%. Adapun daerah yang telah mencapai persentase PAD-nya di atas 50% baru sebanyak 10 daerah. Sementara daerah yang PAD-nya berada di bawah 30% tercatat sebanyak 10 daerah. Bahkan terdapat 2 daerah yang PAD-nya di bawah 10% dari seluruh pendapatan daerah. Ini mengindikasikan masih banyak daerah yang sangat tergantung bantuan dari pusat untuk membiayai segala kewajibannya terkait dengan pembangunan dan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka buku ini disusun dengan mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Pusat Penelitian (Puslit) Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tahun 2016. Buku ini bertujuan untuk memberikan catatan penting sebagai sumbang saran menyangkut Kebijakan dan Strategi yang perlu ditempuh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pembangunan Nasional. Sumber informasi dan data untuk menganalisis dan membahas kebijakan dan strategi peningkatan PAD berasal tidak saja dari sumber literatur, tetapi juga dari hasil penelitian lapangan khususnya di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Pemilihan kedua lokasi lapangan penelitian tersebut didasarkan atas pertimbangan tingkat keberhasilan perolehan PAD masing-masing daerah. Adapun lingkup penelitian yang dilakukan antara lain meliputi sumber PAD, regulasi dalam PAD, permasalahan



yang dihadapi daerah dalam meningkatkan PAD, kebijakan PAD daerah, kemampuan daerah memenuhi kebutuhan pembiayaan baik melalui pajak daerah, retribusi, laba BUMD, dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya serta sumber PAD lain yang sah yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan.

Selain itu juga diteliti bagaimana sinergi hubungan pusat dan daerah dalam mewujudkan kebijakan pembangunan nasional. Temuan dan pembahasan dari hasil penelitian ini dituangkan dalam 4 bab buku ini. Detail dari diskusi dan pembahasan masing-masing bab dalam buku ini adalah sebagai berikut.

Tulisan pertama mengawali pembahasannya dengan kebijakan desentralisasi yang merupakan salah satu upaya Indonesia untuk meningkatkan pemerataan pembangunan. Diharapkan, melalui kebijakan ini daerah-daerah di seluruh Indonesia mampu meningkatkan program pembangunan bukan hanya diarahkan dari pusat tetapi lebih mengutamakan kebutuhan masyarakatnya.

Melalui UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Untuk memperkuat hal tersebut maka lahir UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, meningkatkan akuntabilitas daerah dan memberikan kepastian kepada dunia usaha. Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada daerah, maka setiap daerah dapat mendorong peningkatan pendapatannya melalui kebijakan dan strategi yang dikembangkan.

Tulisan kedua mendiskusikan tentang Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Tujuan Pembangunan. Dalam bab ini dibahas antara lain pembangunan regional, perkembangan kewenangan otonomi daerah, hubungan keuangan antara pusat dan daerah serta perkembangan kebijakan PAD dan perkembangan

penerimaan daerah kurun waktu 2009 sampai dengan 2015. Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Pendekatan kuantitatif menggunakan metode *pairwise correlation* di mana matriks perbandingan berpasangan digunakan untuk menunjukkan bobot relatif antara PAD dengan tujuan pembangunan. Sementara pendekatan kualitatif didasarkan pada *focus group discussion* dan wawancara dalam penelitian yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung dan Kota Tangerang. Pada akhir pembahasan, didiskusikan pula mengenai permasalahan dan strategi pengelolaan PAD.

Selanjutnya, tulisan ketiga membahas mengenai kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan PAD-nya. Pemilihan Kota Tangerang sebagai salah satu daerah penelitian dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada tahun 2016 yang menyampaikan bahwa Kota Tangerang merupakan salah satu daerah yang dapat dijadikan contoh dalam meningkatkan PAD-nya. Selain wawancara di atas, wawancara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang, serta akademisi dari Universitas Pelita Harapan dan Universitas Indonusa Esa Unggul juga dilakukan untuk menajamkan analisis temuan penelitian ini.

Untuk mempertajam analisis temuan yang diperoleh di Kota Tangerang, Provinsi Banten, dilakukan pula penelitian lapangan di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian di kota Bandung tersebut didiskusikan dan dibahas dalam tulisan keempat. Lingkup yang dibahas dan dianalisis tidak saja menyangkut kebijakan pemerintah kota Bandung dalam meningkatkan PAD-nya, tetapi juga diungkapkan temuan penelitian mengenai permasalahan-permasalahan dalam meningkatkan PAD di Kota Bandung dan upaya strategis dalam meningkatkan kemampuan daerah memenuhi kebutuhan pembiayaan

*Prolog: Peningkatan PAD Pembangunan Nasional*

baik melalui pajak daerah, retribusi, laba BUMD, dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya serta sumber PAD lain yang sah yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan.

Adapun sumber data dari tulisan ini berasal dari hasil wawancara dengan pihak terkait Pemerintah Kota Bandung dan Para Tenaga Ahli serta pengumpulan data sekunder yang dipublikasikan oleh Pemerintah Kota Bandung. Akhirnya, untuk merangkum dan menarik benang merah analisis dan pembahasan dari seluruh bab tersebut diberikan epilog pada bagian akhir buku ini.

# **BAGIAN KEENAM**

## **EPILOG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PAD KE DEPAN**

*Carunia Mulya Firdausy<sup>1</sup>*

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*). Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dari catatan yang ada ternyata bahwa sampai tahun 2016, rata-rata PAD berdasarkan provinsi hanya mampu mencapai 37,8% dari total pendapatan daerah masing-masing. Belum ada daerah yang

---

1 Penulis adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR).

persentase PAD terhadap pendapatan daerahnya mencapai 70%. Daerah yang mencapai persentase PAD-nya di atas 50% hanya sebanyak 8 daerah, sementara daerah yang PAD-nya berada di bawah 30% tercatat 11 daerah. Bahkan terdapat 2 daerah yang penerimaan PAD-nya di bawah 10%. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah belum memperlihatkan kemandiriannya dan masih sangat tergantung pada bantuan dari pusat untuk membiayai segala kewajiban terkait dengan pembangunan dan pemerintahan daerahnya masing-masing.

Tentu banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya PAD. Nafsi Hartoyo (2017), misalnya, mencatat 7 penyebabnya sebagai berikut. Pertama, kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah. Kedua, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah. Ketiga, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah. Keempat, kelemahan kualitas SDM aparatur. Kelima, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya. Keenam, ketidaktimisan akan hasil yang mungkin dicapai. Ketujuh, sering kali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (*mark up*) sejak awal pada setiap anggarannya. Padahal jika sejak awal penganggaran biaya program diefektifkan sehemat mungkin, maka sisa yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berbeda dengan catatan penyebab di atas, Jaya (1996) mengungkapkan penyebab utama rendahnya PAD adalah sebagai berikut. Pertama, kurang berperannya Perusahaan Daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Kedua, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat. Ketiga, kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan. Keempat, alasan politis di mana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong

terjadinya disintegrasi dan separatisme. Kelima, kelemahan dalam pemberian subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerahnya.

Catatan lain menyangkut penyebab rendahnya PAD juga dikemukakan oleh Widayat Wahyu (1994). Menurut Widayat Wahyu (1994), paling tidak terdapat 7 penyebabnya. Pertama, banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya, pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Kedua, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya. Keempat, adanya kebocoran-kebocoran. Kelima, biaya pungut yang masih tinggi. Keenam, banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan. Ketujuh, kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa memasuki tahun ke-17 penerapan otonomi daerah di Indonesia, permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan PAD relatif masih sama. Meskipun pada tatanan otonomi daerah yang berlaku saat ini telah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, namun dalam permasalahan peningkatan PAD masih ditemukan permasalahan yang sama. Pertama, umumnya pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya. Kedua, sebagian besar daerah masih belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Ketiga, daerah masih menganggap bahwa rendahnya pendapatan PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan

pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 2009. Daerah melihat banyak jenis dan objek pajak serta retribusi yang masih dapat diterapkan, tetapi tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Keempat, daerah masih melihat bahwa potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak rokok. Kelima, adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam kuantitas maupun kualitas. Disadari bahwa dengan sistem yang masih belum sepenuhnya terintegrasi, jumlah SDM untuk dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi masih sangat kurang. Pemahaman SDM terkait dengan pajak dan retribusi daerah menjadi penting karena SDM di lapangan harus dapat memberi penjelasan yang mudah dimengerti masyarakat. Pemahaman SDM menjadi untuk tombak untuk membangun kesadaran pentingnya membayar pajak dan retribusi dari masyarakat.

Guna menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, membangun sistem administrasi yang baik dan upaya melakukan pengawasan yang efektif tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang dimiliki daerah. Saat ini dengan melihat kemampuan daerah melalui gambaran PAD, nampaknya untuk pembiayaan seluruh kegiatan untuk meningkatkan PAD masih akan terkendala. Daerah harus melakukan pemilihan prioritas kegiatan yang akan dibiayai lebih awal.

Sebagaimana disebut sebelumnya bahwa dengan sistem administrasi pendapatan PAD yang saat ini dimiliki sebagian besar daerah, akan sulit untuk meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Sistem administrasi yang manual dan tidak terintegrasi akan cenderung menimbulkan kebocoran pendapatan daerah. Contoh yang sudah bagus dan sudah mulai diterapkan adalah sistem *online* pendapatan Pajak Restoran yang dimiliki Kota Bandung. Dengan alat yang disediakan pemerintah daerah Kota Bandung yang ditempatkan di restoran-restoran besar dan terhubung dengan pusat data di Pemda

Kota Bandung, maka aktivitas transaksi restoran dapat dipantau secara *real time* (langsung). Namun diakui, upaya peningkatan pajak melalui sistem ini memang membutuhkan investasi pemerintah daerah yang besar.

Keenam, lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum efektifnya pengawasan ini juga terjadi pada pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Banyak cara yang diungkapkan dalam literatur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Namun dari hasil penelitian ini, secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak ataupun dengan menjangkau wajib pajak baru.

Diungkapkan bahwa salah satu cara yang ditempuh dalam peningkatan PAD di Kota Bandung dan Kota Tangerang yakni dengan pemutakhiran data wajib pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. Kebijakan ini ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung sejak dilimpahkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2). Kebijakan ini ditetapkan untuk memperoleh potensi pajak yang mendekati potensi riil bersumber dari PBB P2. Kebijakan ini juga dimaksudkan agar daerah dapat memproyeksikan target penerimaan yang bersumber dari pajak tersebut. Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan ini adalah dengan membentuk tim kerja yang diturunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan WP dan



objek pajaknya. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang.

Implementasi dari kebijakan tersebut di kedua daerah telah dilakukan sejak tahun 2014 dengan cara pendataan ulang dan verifikasi WP dan objek pajaknya. Upaya yang dilakukan yakni dengan menurunkan tim kerja untuk pemutakhiran data dan memperbaiki serta mempermudah pembayaran pajak. Meskipun masih menghadapi kendala untuk mengoptimalkannya, namun hasil dari pemutakhiran data ini telah memberikan kontribusi peningkatan penerimaan pajak yang bersumber dari PBB P2.

Peningkatan penerimaan pajak kota Bandung dan Kota Tangerang juga diperoleh melalui Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Perolehan penerimaan pajak dari BPHTB ini untuk kedua kota tersebut cukup signifikan karena didorong dengan banyaknya pembangunan perumahan yang ada di dua kota ini. Kedua pemerintah daerah ini memberikan pelayanan berupa kemudahan pembayaran pajak yang bekerja sama dengan bank daerah dan notaris yang melakukan pengurusannya.

Daerah memandang perlu ada kebijakan pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menurunkan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Keleluasaan penetapan NJOPTKP ini akan dapat mendorong peningkatan data WP dan meningkatkan penerimaan dari dua komponen pajak daerah ini.

Selain kebijakan di atas, pemerintah Kota Bandung juga melakukan pemutakhiran data Pajak Restoran. Pemerintah daerah Kota Bandung melihat bahwa potensi dari pajak ini sangat tinggi dengan bermunculannya cafe dan restoran. Tentu, implementasi kebijakan ini memiliki kendala tersendiri. Namun demikian upaya untuk mengintensifkan penerimaan pajak ini harus terus dilakukan. Alat *tapping* yang ditempatkan di *cash register* cafe atau restoran sudah mulai dirintis dengan menerapkan prioritas penempatan. Dengan anggaran yang terbatas untuk pengadaan alat *tapping* ini,

sejak tahun 2014 hasilnya mulai kelihatan. Penerimaan dari pajak restoran ini mengalami peningkatan karena setiap transaksi penjualan dapat dipantau secara *online* oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung. Penerapan alat ini secara prioritas ditempatkan pada cafe dan restoran yang relatif besar dilengkapi izin usahanya, baik berdasarkan tempat maupun volume pengunjung. Informasi mengenai cafe dan restoran yang akan diberikan alat *tapping* diperoleh dari tim yang diturunkan kelapangan untuk melakukan survey atau pemantauan.

Pemerintah Kota Tangerang juga menerapkan kebijakan yang sama dengan Kota Bandung. Pemerintah Kota Tangerang berusaha mencontoh apa yang telah dilakukan Kota Bandung. Hanya saja, perkembangan cafe dan restoran di kota Tangerang tidak sebanyak kota Bandung. Beberapa restoran khususnya restoran cepat saji makanan tradisional daerah menolak untuk menerapkan alat *tapping*. Upaya persuasif dan sosialisasi terus dilakukan pemerintah Kota Tangerang. Disadari bahwa alat *tapping* sendiri tidak murah, maka jumlah pengadaan alat ini pun belum banyak dan masih dalam proses uji coba. Upaya peningkatan pendapatan dari pajak restoran masih dilakukan dengan cara mendatangi restoran, mencatat dan memungut langsung pajak yang semestinya dibayarkan oleh tim kerja bentukan pemerintah Kota Tangerang. Kegiatan pemungutan ini dilaporkan secara *online* oleh petugas pajak di lapangan.

Melihat upaya dan keberhasilan yang dicapai dua daerah ini untuk meningkatkan PAD, kebijakan ini patut diikuti oleh daerah lain. Hal ini karena peningkatan PAD yang bersumber dari pelimpahan PBB P2 dan BPHTB di kedua daerah ini dapat dikatakan cukup berhasil, meskipun menyisakan beban daerah untuk membiayai kegiatan pemutakhiran data dan pemungutan terhadap pajak tersebut. Hal ini mungkin akan berbeda jika diterapkan di kabupaten yang jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan relatif pergerakan ekonominya tidak terlalu cepat. Untuk daerah kabupaten mungkin pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan

(PBB P3) dari pusat ke daerah akan dapat memberikan dorongan peningkatan PAD.

Untuk peningkatan pendapatan dari retribusi, Daerah harus dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan retribusi memiliki sifat iuran berdasarkan pelayanan jasa yang diberikan daerah langsung kepada masyarakat yang mendapat manfaat.

Pada akhirnya keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, strategi dan besarnya PAD atau keuangan yang dimiliki oleh daerah tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, dan faktor organisasi dan manajemen.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan daerah harus dapat membuat kebijakan sekaligus strategi yang tepat sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing untuk dapat mengoptimalkan instrumen PAD yang telah diatur oleh undang-undang. Keberhasilan Kota Bandung dan Kota Tangerang dapat menjadi referensi daerah lain untuk meningkatkan PAD. Keberhasilan tersebut harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, anggaran yang cukup dan sistem kerja yang efektif dengan menerapkan teknologi informasi yang semakin canggih.

Selain pentingnya perencanaan dan pelaksanaan dan Penatausahaan, diperlukan pula pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menjalankan tahapan strategi pengelolaan PAD mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi pada tahap perencanaan, koordinasi dan konsolidasi di pelaksanaan serta optimalisasi pengawasan. Hal ini sejalan dengan anggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah perlu didorong untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam mengelola penerimaan daerahnya melalui peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Perbaikan jasa

*Epilog : Kebijakan dan Strategi Peningkatan PAD Ke Depan*

layanan dan peningkatan fasilitas publik akan membuat kesadaran wajib pajak meningkat dan secara langsung mendorong peningkatan kontribusi PAD terhadap APBD. Dengan begitu sasaran otonomi untuk menghasilkan daerah yang mandiri dalam mewujudkan tujuan pembangunan regionalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tercapai. Tentu masih banyak lagi pekerjaan rumah lain yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD-nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nafsi Hartoyo, SE,M.AP, "Optimalisasi PAD untuk Peningkatan Kinerja Pemda", [http://bppk.depkeu.go.id/bdk/malang/attachments/293\\_1.Mengenal%20%20PAD.pdf](http://bppk.depkeu.go.id/bdk/malang/attachments/293_1.Mengenal%20%20PAD.pdf), diunduh 1 Mei 2017.
- Jaya, W.K. 1996, "Analisis Keuangan Daerah: Pendekatan Makro", Model Program PMSES, Kerjasama Ditjen PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, UGM, Yogyakarta.
- Widayat, Wahyu, 1994, "Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah", Jurnal Akuntansi dan Manajemen, STIE YKPN, XXI/No. 3.

# INDEKS

## A

akuntabel, 16, 66, 72, 81  
akuntabilitas, 3, 9, 45, 46, 106, 108,  
121  
daerah, 3, 99  
anggaran, 15, 18, 30, 32, 44, 46, 70,  
93, 124, 128  
berbasis kerja, 72, 73, 128  
terbatas, 126  
Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah (APBD), 23, 51, 83, 94,  
129  
Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara (APBN), 47

## B

Bappenas, 68  
Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  
23  
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),  
23, 27, 30, 123  
belanja daerah, 83, 87, 93  
belanja modal, 57, 66, 73  
birokrasi, 12, 42, 81, 122

## D

daerah, 2, 4, 7, 8, 12, 15, 64  
kemampuan keuangan

pemerintah, 9  
kemandirian, 2, 10, 40, 89, 105,  
106, 108  
kewenangan, 3, 66  
pembangunan, 2, 8, 21, 42, 45,  
65, 77, 121  
otonomi, 9, 10, 13, 15, 19, 33, 39,  
44, 50, 97, 128  
desentralisasi, 3, 13, 14, 15, 16, 18,  
39, 41, 44  
fiskal, 45, 47, 64, 73, 97, 98  
*development function*, 9, 121  
diskresi, 9, 52, 121  
disintegrasi, 27, 123

## E

efektivitas, 39, 69  
efisiensi, 39, 47, 89, 114  
ekonomi, 17, 20, 43, 44, 55, 60, 66,  
78, 85, 103  
daerah, 85  
evaluasi, 46, 82, 87  
ekstensifikasi, 30, 71, 73, 90, 91, 94,  
125

## F

finansial, 64  
fiskal, 2, 17, 44, 45, 101

**G**

*good governance*, 16  
geografis, 1, 8

**H**

hukum, 12, 42, 51 100, 112, 116,  
122

**I**

implementasi, 31, 32, 46, 70, 72,  
116, 126  
indikator, 57, 65, 66, 73, 110, 114  
Indikator Pembangunan, 57  
Indonesia, 1, 3, 7, 10, 28, 39, 42, 45,  
55, 61, 101, 104, 123  
investasi, 10, 15, 17, 29, 51, 69, 71  
integral, 8  
intensifikasi, 30, 31, 71, 73, 88, 90,  
92, 94, 125

**J**

jasa, 21, 22, 33, 60, 61, 73, 80

**K**

kabupaten, 8, 13, 21, 33, 42, 51, 52,  
59, 60, 68, 97, 101, 123  
kota, 8, 10, 13, 21, 42, 52, 61  
kapasitas, 9, 16, 46, 67, 69, 121  
kapita, 43, 57, 67  
kebijakan, 7, 9, 13, 15, 16, 18, 31, 32,  
41, 44, 47, 51, 66, 73, 104  
desentralisasi, 3, 15, 16, 19  
ekonomi, 17  
fiskal, 17  
keuangan, 3, 9, 18, 20, 33, 64, 78, 85,  
100

daerah, 9, 41, 46, 49, 85, 92  
pengelolaan, 18, 41, 49, 67, 92  
kewenangan, 3, 9, 15, 18, 20, 25, 40,  
101, 121, 126  
daerah, 66  
fiskal, 44, 45, 98  
Otonomi Daerah, 3, 44  
perpajakan, 98, 99  
kinerja, 8, 30, 73, 114

**L**

lembaga, 115

**M**

masyarakat, 8, 15, 21, 29, 40, 43, 45,  
57, 64, 74, 78, 87, 93, 106  
modal, 23, 57, 66

**N**

nasional, 3, 7, 16, 17, 19  
pembangunan, 3, 8, 40  
perekonomian, 60, 78  
negara, 8, 14, 43, 44, 47, 98  
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena  
Pajak, 32, 126

**O**

Objek Pajak, 28, 30, 32, 78, 88, 90,  
101, 107  
*online*, 29, 33, 72, 118  
organisasi, 15, 33, 81, 128  
Otonomi, 1, 8, 10, 12, 13, 15, 21, 40,  
64, 73  
Daerah, 1, 10, 13, 16, 19, 28, 33,  
44, 50, 73, 85, 97, 128

## Indeks

### P

pajak, 9, 12, 17, 19, 27, 29, 30, 31, 42, 45, 52, 57, 85, 99, 100  
daerah, 21, 22, 25, 30, 51, 57, 58, 66, 77, 85, 89, 92, 100  
pemungutan, 29, 89, 115, 119, 124  
penghasilan, 29, 68, 91  
pertambahan nilai, 29, 68, 102, 124  
potensi, 31, 66, 71, 107, 109, 115, 119, 125  
restoran, 29, 32, 33, 85, 102, 109, 124  
rokok, 29, 52, 124  
wajib, 71, 72  
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, 31, 125  
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 31, 126  
Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan dan pertambangan, 33, 127  
pembangunan, 1, 3, 4, 7, 9, 15, 40, 42, 45, 77, 78, 82, 97, 105  
ekonomi, 43, 55  
daerah, 8, 10, 21, 45, 65, 77, 94, 121  
nasional, 2, 8  
pedesaan, 19  
regional, 57, 64, 66, 71  
wilayah, 43, 44  
pemberdayaan, 9, 16, 19, 40  
pembiayaan, 2, 4, 20, 30, 40, 45, 49, 52, 57, 77, 100, 124  
pemerataan, 3, 9, 55, 108  
Pemerintah Daerah, 8, 9, 13, 18, 20, 29, 32, 41, 49, 64, 73, 77, 83, 97, 98, 100, 105, 121  
Pemerintah Pusat, 12, 14, 16, 47, 77, 87, 94, 100, 105  
Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2, 10,

12, 19, 23, 25, 30, 40, 49, 57, 61, 71, 77, 93, 121  
pendapatan daerah, 9, 12, 19, 25, 29, 46, 52, 83, 87  
penduduk, 8, 33, 60, 66, 73, 127  
penerimaan daerah, 3, 21, 46, 49, 52, 64, 73, 105, 108, 128  
Peraturan Daerah, 20, 28, 69, 83, 100, 118  
perekonomian, 2, 17, 43, 51, 54, 60, 101, 102, 104  
nasional, 60, 78  
pertumbuhan ekonomi, 43, 66, 78, 81, 102, 108, 121  
Perusahaan Daerah, 19, 27, 122  
prinsip demokrasi, 9, 106  
produk, 104  
produktivitas, 88  
Produk Domestik Bruto, 85, 103  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 57, 60, 61, 66, 73, 85  
*public service function*, 9, 121

### R

*Real Time*, 29, 63, 83  
reformasi, 45, 49  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah, 31, 81, 125  
retribusi, 3, 4, 18, 22, 27, 33, 42, 72, 88, 89, 100, 116, 118, 122  
daerah, 9, 19, 20, 22, 25, 28, 51, 57, 64, 67, 86, 105, 123

### S

sistem, 8, 29, 51, 90, 109, 124  
administrasi, 29, 30, 70  
hukum, 12, 42  
informasi, 89, 119  
kerja, 34



## *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*

*online*, 29, 124  
otonomi daerah, 10  
pelayanan publik, 16, 44  
strategi, 2, 3, 8, 13, 31, 39, 41, 67, 71,  
79, 125, 128

### **T**

tanggung jawab, 8, 16, 97  
transaksi, 29, 32, 109, 112, 115, 127  
transfer, 23, 46, 52, 64, 73, 98  
transparansi, 46  
terintegrasi, 29, 69, 115  
transaksi restoran, 29, 125  
*tapping*, 29, 32, 69, 92

### **U**

undang-undang, 8, 13, 21, 34, 66, 98,  
106  
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD  
1945), 7

### **W**

Wajib Pajak, 30, 31, 71, 72, 88, 89,  
90, 94, 109, 112, 115, 116, 125

## BIOGRAFI EDITOR DAN PENULIS

### BIOGRAFI EDITOR

**Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D., APU.** adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR). Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1957. Gelar Sarjana diperoleh dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke jenjang *Master Degree di bidang Agricultural Development Economics (MADE)* dari *Australian National University, Canberra, Australia* pada tahun 1986. Kemudian meraih Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dari *University of Queensland, St. Lucia, Brisbane-Australia* pada tahun 1992. Tahun 1995-1996, menjadi Staf Ahli Khusus Menteri Sekretaris Negara dalam pembuatan materi Pidato Presiden RI bidang Ekonomi. Kemudian tahun 1997-2001 menjadi Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Tahun 2001-2002 menjadi Staf Ahli bidang Ekonomi, Dewan Ketahanan Nasional. Tahun 2005-2010 menjadi Deputy Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) pada Bidang Dinamika Masyarakat dan *President of Non-Align Movement for Science and Technology (NAM)*, serta *Chairman of ASEAN Committee on Science and Technology (ASEAN-COST)*.



Pengabdianannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi mencakup antara lain: (a) penelitian dalam bidang ekonomi pembangunan, makro ekonomi dan ekonomi internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); (b) Konsultan penelitian *Asian Development Bank (ADB)*, *United Nation for Economic and Social for Asia and Pacific (UN-ESCAP)*, *International Labour Organization (ILO)*, UNDP, UNCTAD, UNSFIR, ISEAS, ISIS dan *World Bank*; (c) Dosen dan pembimbing mahasiswa program S1, S2, dan S3, untuk mahasiswa di beberapa Universitas seperti UI, IPB, UNPAD, dan UNTAR; (d) Mitra Bestari Buletin Ilmiah Perdagangan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Jurnal Standarisasi, BSN; (e) Redaktur Jurnal Ekonomi UNTAR dan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI; (f) sejak tahun 2008 menjadi *Editorial Member of Journal of Social and Economic Science*, *International Journal of Development Research and Quantitative Techniques* dan *International Journal of Economics and Business Studies*, New York, USA; (g) Editor dari berbagai Jurnal Ekonomi; (h) Penyunting dari berbagai buku dan prosiding bertemakan ekonomi; dan (i) *Coordinator East Asian Development Network (EADN)* untuk Indonesia dan anggota *Think Tank Asian Development Bank (ADB)* sejak tahun 2010. Berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk jurnal telah diterbitkan antara lain dalam *Review of Asian Development Bank (ADB)*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS)*, ILO dan UN ESCAP. Demikian pula dengan buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh UN ESCAP, ILO, UNSFIR, UNDP dan ADB serta penerbit internasional lainnya. Alamat email yang dapat dihubungi adalah [cmfirdausy@gmail.com](mailto:cmfirdausy@gmail.com) dan [carunia\\_firdausy@yahoo.com](mailto:carunia_firdausy@yahoo.com).

## **BIOGRAFI PENULIS**

**Achmad Sani Alhusain, SE.,MA.,** lahir di Cimahi, 11 Mei 1972. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen, Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, tahun 1998. Menyelesaikan *Master of Art in Economic Policy* di *Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, USA*, 2002. Penulis merupakan Peneliti Madya Golongan IV/a dengan bidang kepakaran Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Tulisan yang sudah diterbitkan antara lain berjudul: Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kreatif, Kebijakan Pemerataan Pembangunan Daerah di Indonesia, dan Upah Minimum: Kebijakan, Permasalahan dan Solusi. Penulis juga aktif melakukan berbagai penelitian, pengkajian, dan analisis yang berhubungan dengan isu-isu kebijakan publik serta memberikan pendampingan pada Alat Kelengkapan Dewan dan dalam proses pembentukan undang-undang yang sesuai dengan bidang kepakaran. Email: sani\_alhusain@yahoo.com

**Ariesy Tri Mauleny, S.Si.,M.E.,** lahir di Palembang, 26 Maret 1975. Penulis adalah Peneliti Muda dengan kepakaran Ekonomi Terapan. Menyelesaikan Sarjana Sains di FMIPA Universitas Indonesia tahun 1997 dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, kekhususan Keuangan Pusat dan Daerah, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2007. Berkarir sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sejak tahun 2010 hingga sekarang. Penulis pernah mendampingi Baleg untuk pembahasan RUU Penjaminan (2015) dan Pansus RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (2014). Penulis juga telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Pemangkasan Anggaran 2016 dan Target Pertumbuhan Ekonomi (2016), Kebijakan PMN dalam Mendukung Perekonomian Nasional (2015), Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Jakarta (2015), Peranan Dana Perimbangan terhadap

Sektor Kesehatan (2014), dan Eksistensi Keuangan Negara Menuju Kemandirian Pembangunan di Era Otonomi Daerah (2013). Penulis juga terlibat dalam penelitian kelompok di antaranya dengan topik: PAD (2016), Konektivitas (2015), Evaluasi Pembangunan Daerah (2014); Efektivitas Dana Perimbangan (2013); dan Pembiayaan Perumahan Rakyat (2012). Penulis dapat dihubungi melalui email: ariesy.t.leny@gmail.com atau ariesy.t.leny@dpr.go.id.;

**Nidya Waras Sayekti, S.E.,MM.**, lahir di Jakarta 3 Juli 1978, menyelesaikan pendidikan D3 di Politeknik Universitas Indonesia Jurusan Perbankan, S1 di Universitas Mercu Buana Jurusan Manajemen, dan S2 Magister Manajemen di universitas yang sama. Penulis mulai berkarir sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI sejak tahun 2010 hingga sekarang. Penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Kebijakan Utang Luar Negeri Indonesia Dari lembaga Keuangan Global (2015), RAPBN-P Tahun 2014 Minim Fungsi Stimulus (2014), Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan (2014), Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Provinsi Maluku Utara (2014), dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air: Peran PJT I dalam Menjaga Ketahanan Air dan Pangan di Provinsi Jawa Timur (2013). Penulis dapat dihubungi melalui email: nidya\_ws@yahoo.com.

**Lisnawati, S.Si.,M.SE.**, adalah peneliti muda dengan kepakaran Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 8 September 1982. Pendidikan S1 Sarjana Sains diselesaikan di FMIPA Universitas Indonesia pada tahun 2005. Pendidikan S2 Ilmu Ekonomi diselesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada Tahun 2008. Bekerja sebagai Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Badan Keahlian

### *Biografi Editor dan Penulis*

DPR RI. Penulis pernah mendampingi Komisi VI untuk pembahasan RUU Perdagangan (2014) dan RUU Koperasi (2012) serta Komisi XI untuk pembahasan RUU *Tax Amnesty* (2016). Penulis juga telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Implementasi Sistem Keuangan Pusat dan Daerah dalam Mendukung Perekonomian Nasional (2015), Kebijakan Ketenagakerjaan (2014). Penulis juga terlibat dalam penelitian kelompok di antaranya dengan topik: PAD (2016), Konektivitas (2015), dan Evaluasi Pembangunan Daerah (2014). Penulis dapat dihubungi melalui email:lisnawati.dpr@gmail.com.

